



## Raperda Perubahan APBD 2018 Fraksi DPRD Sampaikan Pemandangan Umum

**LANDAK** - Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Landak menyampaikan pandangan umum atas Raperda Perubahan APBD Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2018 di Ruang Rapat Paripurna, Senin (3/9) siang. Ketua fraksi setuju untuk melanjutkan pembahasan dengan beberapa catatan.

Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, Hasnawari APBD perlu disusun dengan baik dan benar. Fraksi Golkar memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap Bupati Landak dan jajaran yang telah menyampaikan nota keuangan terkait perubahan APBD TA 2018. Disamping itu, pihaknya perlu mengetahui dasar-dasar pertimbangan perubahan APBD tersebut. Mengenai prioritas yang menjadi perhatian utama pada APBD tahun ini.

Untuk memberikan optimisme, bahwa di tahun 2018 akan terjadi perubahan dinamika yang berorientasi adanya sinergi rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan nasional. Yakni memacu investasi dan pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan. Tema tersebut mampu menjadi acuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Landak. Sehingga dapat tercapainya target pada akhir 2018.

Pada kesempatan itu, ia juga sempat menyinggung penyaluran bantuan alat-alat pertanian dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Juru bicara Fraksi Golkar Hasnawari, mempertanyakan mekanisme penyaluran bantuan tersebut. Menurutnya dari hasil pantauan di lapangan, masih banyak petani yang belum menerima bantuan tersebut. "Sehingga terdapat indikasi bahwa bantuan tersebut mengardung muatan politis," katanya.

Selanjutnya, mengenai dana hibah. Fraksi



Wakil Bupati Landak Herculanus Heriadi menerima pandangan fraksi-fraksi DPRD Landak dari Wakil Ketua DPRD Landak Oki Apus.

Golkar juga mempertanyakan peningkatan angka dana hibah yang cukup signifikan. Dari Rp 33,950 Milyar menjadi Rp 97,644 Milyar. Terjadi peningkatan sebesar Rp 63,82 Milyar. Terjadi pengurangan sebesar Rp 12,201 Milyar. Dari semula Rp 641,586 Milyar menjadi 629,364 Milyar.

Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga terjadi penurunan sebesar Rp 1,784 Milyar. PAD yang semula berada di angka Rp 83,60 Milyar menjadi Rp 81,809 Milyar. Meskipun di sisi lain terjadi peningkatan pada sektor pajak sebesar Rp 839,880 juta. Tetapi hasil retribusi daerah mengalami penurunan sebesar Rp 1,235 Milyar. "Kami mohon penjelasan atas perubahan angka-angka ini," katanya.

Fraksi Partai Nasional Demokrat melalui juru bicaranya, Martinus, menyampaikan pihaknya memandang dapat terwujudnya sebagai dinamika serta apresiasi prioritas masyarakat yang diperoleh melalui berbagai masukan. Baik melalui proses Musrenbang, reses DPRD Kabupaten Landak serta yang tak kalah pentingnya, pemerintah daerah diharapkan mampu membaca kondisi

ril yang terjadi. "Mana saja yang menjadi kebutuhan pokok dan prioritas di masyarakat. Dengan tetap memegang prinsip pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparansi akuntabel, disiplin, berkeadilan, efisien dan efektif," katanya.

Fraksi Partai Nasdem juga menyinggung hal serupa. Menurut Martinus, pihaknya meminta penjelasan kepada pemerintah daerah. Terkait meningkatnya dana hibah secara signifikan. "Selain itu, kami secara garis besar dapat menyetujui Raperda ini agar dapat dilanjutkan pembahasannya," katanya.

Sementara itu Wakil Bupati Landak Herculanus Heriadi yang hadir pada rapat paripurna tersebut menyampaikan apresiasinya atas pandangan umum yang telah disampaikan fraksi-fraksi di DPRD. Menurutnya, apa saja yang telah disampaikan oleh fraksi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan yang lebih lanjut.

"Semua masukan akan kami terima dan kami jadikan bahan. Tentunya juga untuk menjawab beberapa pertanyaan dari beberapa fraksi pada rapat paripurna selanjutnya," tutupnya (alf/Adv).